

**PERAN HUMAS POLRES PIDIE DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF
LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM
DI MATA MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE**

Muhammad Hafizh⁽¹⁾, Suhaibah⁽²⁾, Al Muttaqien⁽³⁾

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

muhammadhafizh@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², al-muttaqien@unigha.ac.id³

*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

Abstrak

Peran humas dalam meningkatkan citra positif suatu instansi pemerintahan di mata masyarakat sangatlah penting. Humas kepolisian berperan dalam membangun citra positif kepolisian di mata masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie. Hambatan Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian. Upaya Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia secara fundamental bergantung pada pengamatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian menunjukkan beberapa cara dimana Humas Polres Pidie dapat membantu membangun citra positif lembaga kepolisian, antara lain menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Pidie, menjaga hubungan yang baik dengan media, membangun hubungan yang positif dengan stakeholder, mengedukasi masyarakat Kabupaten Pidie, dan memberikan respons yang tepat dan akurat dalam menghadapi isu-isu positif yang berkaitan dengan lembaga kepolisian. Hambatan Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie, antara lain: keterbatasan akses informasi, tantangan dalam menyebarkan informasi, perbedaan persepsi dengan masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya kompetensi dan keterampilan, dan isu-isu kontroversial. Upaya Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie, antara lain, meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi, mengembangkan Branding Polri, memperbaiki tata kelola internal Polri, melakukan sosialisasi kebijakan dan program Polri, serta mengadakan kegiatan sosial.

Kata Kunci: Peran, Humas, Citra Positif, dan Lembaga Kepolisian

Abstract

The role of public relations in enhancing the positive image of a government agency in the eyes of the public is very important. Police Public Relations plays a role in building a positive image of the police in the eyes of the public. The purpose of this study was to find out the role of the Pidie Police Public Relations in Building a Positive Image of the Police Institution as Law Enforcement in the Eyes of the People of Pidie Regency. Obstacles to Pidie Police Public Relations in Building a Positive Image of Police Institutions. Pidie Police Public Relations Efforts in Building a Positive Image of Police Institutions. The research method used in this study is qualitative research, because human-related problems fundamentally depend on observation. Based on the results of interviews and research observations, there are several ways in which Pidie Police Public Relations can help build a positive image of the police institution, including establishing good communication with the people of Pidie Regency, maintaining good relations with the media, building positive relationships with stakeholders, educating the people of Pidie Regency. , and provide appropriate and accurate responses in dealing with positive issues related to the police institution. Obstacles to Public Relations of the Pidie Police in Building a Positive Image of the Police Institution as Law Enforcement in the Eyes of the Pidie District Community, including: limited access to information, challenges in disseminating information, differences in perceptions with the community, limited resources, lack of competency and skills, and controversial issues . Pidie Police Public Relations Efforts in Building a Positive Image of the Police Institution as Law Enforcement in the Eyes of the People of Pidie District, among others, increasing the Use of Information Technology, developing Polri Branding, improving Polri's internal governance, conducting socialization of Polri policies and programs, and holding social activities.

Keywords: Role, Public Relations, Positive Image, and Police Agency

Pendahuluan

Peran humas dalam meningkatkan citra positif suatu instansi pemerintahan di mata masyarakat sangatlah penting. Sebagai perwakilan dari instansi tersebut, humas bertugas untuk mendengarkan, menegosiasikan, mengelola konflik, dan menjalin kesepakatan.¹ Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian Indonesia bekerja sama dengan instansi lain, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga terkait lainnya. Selain itu, kepolisian juga berupaya untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat dan komunitas lokal untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban.²

Menurunnya citra positif kepolisian di mata masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai aspek, misalnya seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, korupsi, keterbatasan sarana dan prasarana, keterlambatan dalam menangani kasus, ketidaknetralan dan komunikasi yang buruk. Karena budaya organisasi kepolisian Indonesia masih terdapat berbagai kelemahan, dapat dilihat dari segi integritas seperti kejujuran, menjaga nama baik, dan taat terhadap kode etik. Temuan survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada Polri mulai mengalami penurunan sebesar 2% poin dari 72% menjadi 70% pada Agustus 2022. Angkanya kemudian anjlok hingga 17% poin menjadi 53% pada Oktober 2022. Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian RI (Polri) semakin menurun. Hal itu utamanya terjadi setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan nyawa.³

Fungsi humas dalam lembaga kepolisian sangat penting karena memiliki peran yang strategis dalam menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Humas kepolisian berperan dalam membangun citra positif kepolisian di mata masyarakat. Humas kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Peran Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie".

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia secara fundamental bergantung pada pengamatan. Metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴ Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam permasalahan yang berkaitan dengan peran humas Polres Pidie dalam membangun citra positif lembaga kepolisian sebagai penegak hukum di mata masyarakat Kabupaten Pidie.

Pembahasan

A. Peran Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie

Humas (Hubungan Masyarakat) Polres Pidie memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie.

¹ Morissan, *Manajemen Publik RelationsI: Strategi Menjadi Humas Profesional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.13

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2002.

³ Monavia Ayu Rizaty, *Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%*, DataIndonesia.id, 16 Februari 2023.

⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.4.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian menunjukkan beberapa cara di mana Humas Polres Pidie dapat membantu membangun citra positif lembaga kepolisian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Pidie.
Humas Polres Pidie selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Pidie. Mereka senantiasa menempatkan diri untuk selalu berada di garis depan dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polres Pidie, serta memberikan penjelasan yang memadai tentang kebijakan dan tindakan Polres Pidie yang kontroversial.
- 2) Menjaga hubungan yang baik dengan media.
Humas Polres Pidie mampu menjaga hubungan yang baik dengan awak media, baik itu media cetak, elektronik, atau sosial. Humas Polres Pidie siap memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada wartawan, serta bekerja sama dengan media dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polres Pidie.
- 3) Membangun hubungan yang positif dengan *stakeholder*.
Selain membangun hubungan yang baik dengan masyarakat Kabupaten Pidie dan media, Humas Polres Pidie juga membina hubungan yang positif dengan *stakeholder* lain seperti Pemerintah Kabupaten Pidie, LSM, dan komunitas masyarakat Kabupaten Pidie. Hal ini dapat membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Pidie terhadap lembaga kepolisian sebagai penegak hukum.
- 4) Mengedukasi masyarakat Kabupaten Pidie.
Humas Polres Pidie juga berperan sebagai agen edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Pidie tentang peran dan tugas lembaga kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Humas Polres Pidie mampu menjelaskan secara detail tentang kebijakan dan tindakan Polri agar masyarakat tidak salah paham dan menimbulkan konflik.
- 5) Memberikan respons yang tepat.
Humas Polres Pidie selalu siap memberikan respons yang tepat dan akurat dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan lembaga kepolisian. Dalam hal ini, Humas Polres Pidie memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk merespon dan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan baik.

Dengan cara-cara di atas, Humas Polres Pidie dapat membantu membangun citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat Kabupaten Pidie terhadap lembaga kepolisian sebagai penegak hukum dan memperkuat peran lembaga kepolisian sebagai penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab terhadap pelayanan publik.

B. Hambatan Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie

Meskipun peran Humas Polres Pidie sangat penting dalam membantu membangun citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie, namun berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi upaya Humas Polres Pidie dalam membangun citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie, antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan akses informasi.
Humas Polres Pidie membutuhkan akses yang lebih baik dan cepat terhadap informasi mengenai kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota Polres Pidie. Namun, keterbatasan akses informasi dapat menjadi hambatan bagi Humas Polres Pidie untuk

- memberikan informasi yang cepat dan terbaru kepada masyarakat.
- 2) Tantangan dalam menyebarluaskan informasi.
Meskipun media sosial memudahkan dalam menyebarkan informasi, tetapi masih terdapat tantangan bagi humas Polres Pidie dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan terpercaya. Hal ini terutama terkait dengan munculnya berita palsu atau hoaks yang dapat merusak citra lembaga kepolisian.
 - 3) Perbedaan persepsi dengan masyarakat.
Masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lembaga kepolisian. Terkadang, perbedaan persepsi ini dapat menghambat upaya Humas Polres Pidie dalam membangun citra positif lembaga kepolisian.
 - 4) Keterbatasan sumber daya.
Humas Polres Pidie mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya seperti sumber daya manusia, waktu, dan anggaran. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja Humas Polres Pidie dalam melaksanakan tugasnya dan membangun citra positif lembaga kepolisian.
 - 5) Kurangnya kompetensi dan keterampilan.
Humas Polres Pidie perlu memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam berkomunikasi dengan masyarakat, media, dan *stakeholder* lainnya. Kurangnya kompetensi dan keterampilan dapat menghambat upaya humas Polres Pidie dalam membentuk citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie.
 - 6) Isu-isu kontroversial.
Polri seringkali terlibat dalam kasus-kasus kontroversial yang dapat mempengaruhi citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat. Isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, atau kasus korupsi dapat membuat masyarakat meragukan integritas dan profesionalitas lembaga kepolisian Republik Indonesia.
- Demikianlah beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi upaya Humas Polres Pidie dalam membangun citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Humas Polres Pidie perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk dapat mengatasi setiap hambatan yang dihadapi, sehingga humas Polres Pidie dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membangun citra positif lembaga kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie.

C. Upaya Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Pidie telah melakukan berbagai upaya untuk membangun citra positif Lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum di mata masyarakat Kabupaten Pidie. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan Humas Polres Pidie dalam membangun citra positif Lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum di mata masyarakat Kabupaten Pidie, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi
Humas Polres Pidie memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat Kabupaten Pidie. Hal ini dilakukan melalui website, aplikasi mobile, dan media sosial.
- 2) Mengembangkan Branding Polri
Humas Polres Pidie juga melakukan pengembangan branding Polri dengan menciptakan slogan atau tagline yang mudah diingat oleh masyarakat, seperti "Polisi Sahabat Masyarakat" dan "Polri Presisi". Branding yang baik dapat membantu membangun citra positif lembaga kepolisian sebagai penegak hukum di mata masyarakat Kabupaten Pidie.

- 3) Memperbaiki tata kelola internal Polri
Memperbaiki tata kelola internal Polri, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan pelatihan kepada anggota Polres Pidie tentang etika dan moral, serta memperkuat sistem pengawasan internal.
 - 4) Melakukan sosialisasi kebijakan dan program Polri
Melakukan sosialisasi kebijakan dan program Polri kepada masyarakat, baik melalui media sosial, televisi, radio, maupun media massa lainnya. Dalam sosialisasi ini, Humas Polres Pidie memberikan informasi mengenai program Polri yang sedang berjalan, seperti penanganan kasus kejahatan, kampanye keselamatan berkendara, dan sebagainya.
 - 5) Mengadakan kegiatan sosial
Mengadakan kegiatan sosial yang dapat meningkatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan humas Polres Pidie antara lain seperti bakti sosial, donor darah, dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam.
- Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan Humas Polres Pidie dapat membangun citra positif Lembaga Kepolisian di mata masyarakat Kabupaten Pidie sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya dan dihormati.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian menunjukkan beberapa cara dimana Humas Polres Pidie dapat membantu membangun citra positif lembaga kepolisian, antara lain menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Pidie, menjaga hubungan yang baik dengan media, membangun hubungan yang positif dengan *stakeholder*, mengedukasi masyarakat Kabupaten Pidie, dan memberikan respons yang tepat dan akurat dalam menghadapi isu-isu positif yang berkaitan dengan lembaga kepolisian.
2. Hambatan Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Keterbatasan akses informasi.
 - 2) Tantangan dalam menyebarluaskan informasi
 - 3) Perbedaan persepsi dengan masyarakat.
 - 4) Keterbatasan sumber daya.
 - 5) Kurangnya kompetensi dan keterampilan.
 - 6) Isu-isu kontroversial.
3. Upaya Humas Polres Pidie Dalam Membangun Citra Positif Lembaga Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Di Mata Masyarakat Kabupaten Pidie, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi.
 - 2) Mengembangkan Branding Polri.
 - 3) Memperbaiki tata kelola internal Polri.
 - 4) Melakukan sosialisasi kebijakan dan program Polri.
 - 5) Mengadakan kegiatan sosial.

Referensi

Buku

Anggoro, M. Linggar, 2005. *Teori & Profesi Kehumasan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Gaussyah. 2014. *Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan.
- Iriantara, Y dan Yani Surachman. 2006. *Public Relations Writing Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Moleong, Lexy. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moore, Frazier, H. Humas. 2005. *Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2008. *Manajemen Public relations, Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, Dedy. 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prisgunanto, Ilham. 2009. *Komunikasi Polisi*. Depok: Prisan Cendekia.
- Rachmat Krittantono. 2017. *Teori-Teori Public relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rumanti, Sr. Mario Assumpta. 2022. *Dasar-Dasar Public Relations: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- S. Gassing, Syarifuddin dan Suryanto. 2016. *Public Relations*. Yogyakarta: ANDI.
- Sitepu, Syahputra, Edy. 2011. *Professional Public relations*. Medan: USU Press.
- Usman, Husni dan Akbar Setiady Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dokumen Lain

- Arif, Muhammad. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jurnal Hukum, Jilid 13, No.1 Tahun 2021.
- Bagus, Ida. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Jurnal Lex Crimen, Jilid 1, No.4 Tahun 2012.
- Hidayati, T. Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). Universitas Gadjah Mada. 2014.
- Maulana, Herdian. Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada Kinerja Kepolisian Terhadap Kepercayaan Pada Kepolisian. Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Jilid 2, No.1 Tahun 2013.
- Setiyono, Joko. Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Jilid 2, No.3 Tahun 2020.
- Monavia Ayu Rizaty. 2023. Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%, Dataindonesia.id.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2002.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Jakarta: Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang struktur organisasi Polri, tugas dan wewenang dari setiap unit kerja di dalam Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang pengelolaan aset dan barang milik negara yang dimiliki oleh Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Reserse Kriminal Polri, yang mengatur tentang struktur organisasi dan tugas Badan Reserse Kriminal Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pengadaan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Penggunaan Anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penggunaan anggaran di dalam Polri.